

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PENGEMBANGAN USAHA

Oleh:

RIZCA MAYRANI

NIM :E1011131136

Martoyo, Martinus

*Email : e1011131136@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha sebagai upaya meningkatkan mutu pangan asal hewan, meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan halal, serta meningkatkan peran pemerintah dalam fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha dibidang peternakan sapi potong di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pangan Peternakan dan Perikanan Kota Pontianak. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan implementasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha di Kota Pontianak Tahun 2018-2019 telah terlaksana secara efektif dan baik, terbukti dari aspek capaian implementasi dan faktor pendukung tercapainya implementasi menunjukkan Pemerintah Kota Pontianak “berhasil” dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perda Kalbar, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

IMPLEMENTATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCIAL REGULATION NUMBER 2 2016 TO FACILITATING THE ESTABLISHMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT AREAS

By:

RIZCA MAYRANI

NIM :E1011131136

Martoyo, Martinus

*Email : e1011131136@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

ABSTRACT

Policy implementation is an actions performed by individuals or officials or government or private groups that are directed at achieving the goals outlined in the policy decision. Implementation of West Kalimantan Provincial Regulation Number 2 2016 about the Implementation of Livestock and Animal Health to facilitating the establishment of business development areas as an effort to improve the quality of food of animal origin, increasing the availability of food of animal origin that is safe, whole, healthy and halal, as well as increasing the role of the government in facilitating the establishment of business development area in the field of beef cattle farming in Pontianak City. This research was conducted at Dinas Pangan Peternakan dan Perikanan of Pontianak City. This research method is qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis was done descriptively. This study examines the implementation of animal husbandry and animal health and the factors that influence the implementation of West Kalimantan government policies in the implementation of livestock and animal health in Pontianak City. The results of this study show that the implementation of the animal husbandry and animal health to facilitating the establishment of business development areas in Pontianak City on 2018-2019 has been carried well and effectively, as evidenced by the aspect of implementation achievements and the supporting factors for achieving implementation, that indicating the Pontianak City Government is "successful" in implementing husbandry and animal health and facilitation of the establishment of business development areas.

Keywords: Policy Implementation, West Kalimantan Regional Regulation, implementation of animal husbandry and health.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Budidaya adalah segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan pemeliharaan hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, budidaya adalah suatu pemeliharaan atau budidaya hewan tertentu yang dapat di kembangbiakan misalnya, hewan sapi, kambing, ayam, ikan dan lain-lain. Budidaya yang sangat cocok adalah budidaya di bidang peternakan salah satunya adalah peternakan sapi potong, sapi potong adalah salah satu komoditas peternakan yang banyak dikembangkan di Indonesia karena peternakan sapi potong sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumsi gizi masyarakat, ekonomi, dan usaha yang sangat populer dikalangan masyarakat.

Masyarakat beranggapan bahwa berternak sapi potong mudah dilakukan, akan tetapi dibutuhkan kemampuan khusus dalam beternak sapi potong agar dapat menghasilkan daging sapi potong yang baik, oleh karena itu dibutuhkannya pendampingan dan arahan oleh pemerintah kepada peternak agar lebih

berdaya dan sejahtera demi terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak hanya bergantung kepada bantuan pemerintah, tetapi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui pendataan pemelihara sapi per-Kartu Keluarga di Kota Pontianak yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah peternak di Kota Pontianak adalah 81 KK dengan jumlah ternak sapi adalah 2842 ekor sapi, tahun 2019 jumlah peternak sapi di Kota Pontianak adalah 189 KK dengan jumlah ternak sapi 2177 ekor sapi yang terdata oleh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Fenomena yang terjadi menunjukkan pada tahun 2019 jumlah peternak sapi di Kota Pontianak meningkat 175 % dari tahun 2018, namun untuk jumlah sapi menurun sebesar 18 %.

Fenomena diatas sangat berpengaruh pada hasil pendataan pertahun, jumlah penjualan dan kebutuhan sapi pertahun. Melalui data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (BPS KALBAR)

produksi daging sapi di Kota Pontianak pada tahun 2018 sebesar 7274 ekor dan 2019 mengalami penurunan kebutuhan daging sapi yang tidak terlalu besar yaitu 6626 ekor, namun jumlah pemotongan sapi tersebut ditambahkan oleh peternakan milik pemerintah dan juga sapi impor dari luar Kota Pontianak.

Karena masih adanya peningkatan jumlah peternak dan penurunan jumlah sapi potong di Kota Pontianak, namun kebutuhan sapi potong masih sangat tinggi diluar jumlah sapi di Kota Pontianak sehingga harus impor dari luar Kota Pontianak. Sehingga diperlukannya peran pemerintah Kota Pontianak dalam pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan di Kota Pontianak.

Peran komoditas ternak sapi potong terhadap pemerataan pendapatan dan potensi pasar cukup signifikan. Bila dilihat dari kebutuhan daging sapi dimasyarakat masih terkendali, namun peningkatan kebutuhan daging sapi meningkat apabila mendekati hari raya keagamaan. Penentuan komoditas sapi potong sebagai prioritas unggulan

dikarnakan dari segi harga daging sapi sapi paling tinggi dibandingkan dengan daging lainnya. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sapi potong di peternak bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan asal daging dan meningkatkan pendapatan peternak. Melalui dukungan dan kebijakan pemerintah, diharapkan dapat tercapai peningkatan populasi dan nilai ekonomi peternak. Selain teknis untuk meningkatkan usaha peternakan sapi potong, juga diperlukan dukungan aspek kelembagaan, aspek komunikasi sehingga dapat berkesinambungan antara pemerintah dan peternak sapi potong.

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No.2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta produk non pangan sebagai industri.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan keterangan yang telah di jelaskan di dalam latar belakang masalah yang ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang lebih tepatnya pada Pasal 39 Ayat (1) yaitu, bahwa Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta produk non pangan sebagai bahan industry. Dan juga meningkatnya peternak sapi potong pada tahun 2018 dan 2019, namun jumlah sapi potong pada tahun 2019 menurun dari tahun 2018 maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumberdaya non manusia dalam pengelolaan budidaya sapi potong dan fasilitas peternak sapi potong di Kota Pontianak.
2. Kurang maksimalnya implementasi program pembinaan Pemerintah Kota Pontianak terhadap peternak sapi dalam pemberdayaan dan pengolahan sapi potong di Kota Pontianak.

3. Kurangnya pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha produk hewan.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Fasilitas Pembentukan Kawasan Usaha Studi Pada Peternak sapi potong di Kota Pontianak. Dalam penerapan implementasi pada penelitian ini penulis membatasi pokok penelitian berdasarkan pada variable yang mempengaruhi kinerja implementasi pada sumber daya, sikap/kecenderungan agen pelaksana, dan komunikasi antr organisasi dan aktivis pelaksana.

4. Rumusan Masalah

Oleh karena pentingnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan, maka

permasalahan yang untuk diketahui dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha Studi Pada Peternak Sapi Potong di Kota Pontianak?”

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah di muka, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha Studi Pada Peternak Sapi Potong di Kota Pontianak. Dengan menggunakan 3 (tiga) variabel implementasi kebijakan yaitu sumber daya, sikap/kecenderungan (*disposition*) agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat peternak sapi potong, guna meningkatkan kemandirian dan memenuhi kebutuhan masyarakat peternak sapi potong. Manfaat lainnya adalah memberikan tambahan literatur bagi dunia akademis demi pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik.

B. KAJIAN PUSTAKA (TEORI)

Kajian kebijakan publik ada beberapa fokus penelitian yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan publik, oleh karena itu teori yang akan disampaikan juga akan berkaitan dengan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (1984) (dalam Leo Agustino, 2008:4) ada tiga hal yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Pertama,

pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*profesional reasons*). Dan ketiga, pertimbangan atau alasan politik (*political reasons*).

Adapun menurut Carl Friderich (dalam Leo Agustino, 2008:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

James Anderson (1984:3) dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Leo Agustino, 2008:7) memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakal oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sepentasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan, agak mirip dengan pandangan kedua ahli, Van Meter dan Van Horn (dalam Agus Purwanto, 2012) merumuskan implementasi ini sebagai

“those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objektivies set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu /pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino,2008:138), yaitu:

“Adalah cukup untuk membuat untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan –slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang

memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam Agustino (2008:139) , Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Menurut Wijaya dan Supartono (dalam Pasolong 2010 : 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Hinggis (dalam Pasolong 2010 : 57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis. Grindle (dalam Pasolong 2010 : 57) implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana

mereka yang berkepentingan berusaha sependapat mungkin mempengaruhinya.

Gordon (dalam Pasolong 2010 : 57) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapainya tujuan. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni : pendekatan *top down* dan pendekatan *button up*. Pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Inti dari pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan tingkat pusat.

3. Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi diantaranya model implementasi kebijakan publik Edward III (1980), Van Meter dan Van Horn (1975), Mazmanian dan Sabatier (1987), Grindle (1980). Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar. Model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut *A Model of The Policy Implementation*. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan proses dan implementasi kebijakan yang telah ada.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang berguna dalam menguraikan

tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber yang mencakup dana atau peransang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan

demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan faktor implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2011 : 100) yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta dengan para agen pelaksananya. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni :

a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,

b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan

c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program

perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir untuk menilai kinerja implementasi dan prospektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Dari 6 (enam) variabel yang telah dipaparkan diatas, penulis menggunakan 3

(tiga) variabel untuk menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber daya
2. Sikap/kecenderungan (*disposition*) agen pelaksana
3. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

4. Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha Peternak Sapi Potong

Memberikan fasilitas berupa penyediaan lahan kepada kelompok peternak merupakan untuk meningkatkan kapasitas produksi peternakan. Pembangunan peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran ini digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan,

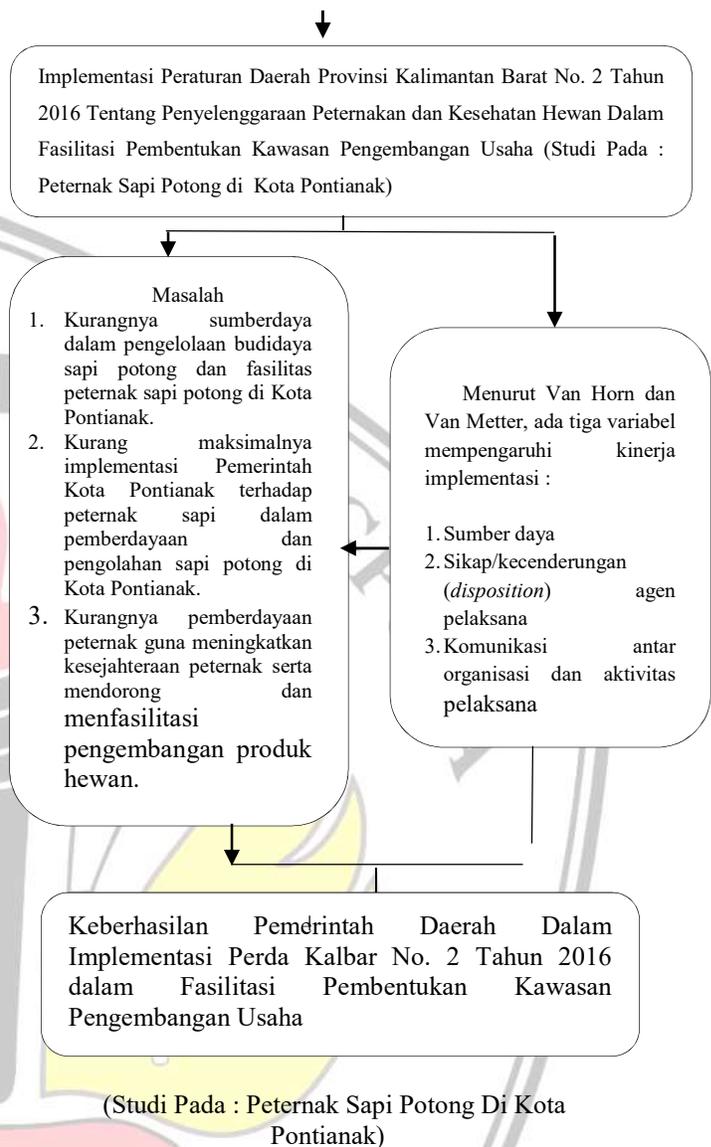
menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan perekonomian tersebut dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor tani seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian perikanan ke depan menghadapi banyak tantangan.

5. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis eksplorasi dikenal juga dengan nama grounded reserach. Arikunto (2006:7) menjelaskam penelitian eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah:

1. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi Kota Pontianak.

Dipilihnya lokasi ini memiliki data pengelolaan dan pengembangan sumber daya sapi potong di Kota Pontianak, dan sebagai lembaga yang memfasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha studi pada peternak sapi potong di Kota Pontianak.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
2. Kepala staf administrasi UPTD RPH Sapi Kota Pontianak.
3. Peternak Sapi potong di Kota Pontianak.

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam memfasilitasi peternak sapi potong di Kota Pontianak terhadap pengimplementasian program pemerintah terhadap peternak sapi potong yang berkorelasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mempergunakan 3 (tiga) cara tehnik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung kepada objek dan subjek yang akan diteliti terhadap segala tindakan dan kegiatan di lapangan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Fasilitas Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha (Studi Pada : Peternak Sapi potong di Kota Pontianak).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu dengan cara pengamatan objek yang akan diteliti dan mendengar subjek tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas-aktivitas dari permasalahan yang timbul dalam Fasilitas Pembentukan Kawasan Pengembangan Usaha Peternak Sapi potong di Kota Pontianak, seperti pada penyelenggaraan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) sapi Kota Pontianak, dan Peternak sapi di Kota Pontianak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu di dalam percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada Kepala Bidang Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, dan sejumlah masyarakat peternak sapi potong.

3. Dokumentasi

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti arsip-arsip, fotocopy, catatan resmi dan bahan-bahan literatur pendukung lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Meringkas (Reduksi) Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat ditarik. Reduksi data

berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri, dimana dilakukan meringkas data dari catatan lapangan, baik secara awal, perluasan, maupun penambahan data. Data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dilakukan pemisahan, dipilih hal-hal pokok yang difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Memaparkan (*Display*) Data

Memaparkan atau menyajikan data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, penyajian data dimaksud untuk menemukan pola – pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Pemaparan data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja, dan tabel sebagai pemaparannya, data yang sudah dipilah-pilah untuk segera diolah sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan untuk melengkapi pada tahap penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi hasil observasi dan wawancara

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi lainnya. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam analisis data kualitatif dan kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang didukung oleh kondisi-kondisi yang kuat dan relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Keabsahan Data

pada penulisan skripsi peneliti, teknik yang peneliti gunakan sebagai teknik pemeriksa untuk mencapai keabsahan data yaitu; triangulasi sumber karena dalam penelitian ini peneliti mencari sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara atau mewawancarai lebih dari satu subjek yang peneliti anggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Capaian Implementasi

Suatu implementasi harus mempunyai capaian/hasil (*output*) yang menjadi tujuan dari implementasi tersebut. Capaian yang hendak dicapai dalam implementasi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No.2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam fasilitasi pembentukan kawasan usaha untuk studi peternak sapi potong di Kota Pontianak adalah pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah menjalankan program – program dalam rangka meningkatkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja segmentasi asal hewan sapi.

Seperti yang tertulis pada Perda KALBAR No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha, yaitu pada pasal 21 tentang penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak, pasal 24 melakukan pembinaan pada peternak atau pelaku usaha, pasal 29 penyediaan alat dan mesin peternakan, pasal 39 pemberdayaan peternak, pasal 40 tentang kesehatan hewan,

pasal 69 peran masyarakat dalam dunia usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pangan Pertanian Perikanan Kota Pontianak telah melaksanakan aspek implementasi melalui program/kegiatan yang telah dilakukan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal “Berhasil”
2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan “Berhasil”
3. Program penjaminan mutu pangan asal hewan “Berhasil”
4. Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat dan halal “Berhasil”
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak “Berhasil”
6. Program peningkatan keamanan pangan hewan “Berhasil”

Dari setiap program yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Pontianak dalam fasilitasi pembentukan kawasan usaha sapi potong mencapai capaian berhasil.

2. Sumber Daya

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang diwakili oleh Kepala Bidang Peternakan, ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari PNS sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dan petugas honor harian sebanyak 50 (lima puluh) orang. Dimana setiap terbagi dalam beberapa bidang pokok kerja sesuai dengan bagian – bagian jabatan Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Pontianak.

Demi mencapai keberhasilan terhadap pencapaian program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak memerlukan dana operasional yang berasal dari APBD Kota Pontianak. Pada tahun 2018 dukungan dana yang diberikan terhadap Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 21.430.271.286,- yang terdiri dari belanja langsung yaitu Rp. 15.133.535.858,- dan belanja tidak langsung Rp. 6.296.735.428,-.

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pemerintah kota pontianak telah memfasilitasi peternak sapi dalam sarana dan prasarana seperti

Rizca Mayrani
Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

Memberikan fasilitas Pemotongan dan Pengelolaan daging sapi di UPTD RPH sapi untuk mewujudkan hasil daging sapi yang ASUH. Kemudian pemerintah memberikan lahan untuk pakan ternak sapi di Kota Pontianak, dan memberikan benih bibit kepada peternak sapi serta pendataan perternak, jumlah dan jenis sapi yang dimiliki peternak, dan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.

3. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Agen Pelaksana

Sikap Penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan, hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi peternak yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang peternak sapi inginkan.

Dalam implementasi peraturan daerah Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan Pertanian

dan Peternakan Kota Pontianak sebagai agen pelaksana sangat setuju dan mendukung dengan adanya kebijakan peraturan daerah ini. Agen pelaksana beranggapan bahwa peraturan daerah ini sangat penting dan selaras untuk tercapainya misi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yaitu untuk mewujudkan ketersediaan bahan pangan hewani yang ASUH bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan.

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan melalui UPTD RPH Sapi Kota Pontianak dalam kegiatan penyelenggaraan peternakan sapi potong di Kota Pontianak melakukan kegiatan seperti melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan pelayanan rumah potong hewan sapi yang meliputi pelayanan informasi pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan hewan sapi untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan sapi potong berjalan lancar .

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak –

pihak terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kejelasan tujuan dan isi kebijakan menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Para agen pelaksana harus mengerti dengan jelas apa tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan dan apa isi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, komunikasi dan koordinasi bukan merupakan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan peternakan hewan khususnya hewan ternak sapi potong di Kota Pontianak bersama dengan kelompok jabatan fungsional yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan memberikan ruang bagi masyarakat atau peternak dalam memberikan masukan, evaluasi, serta saran kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan peternakan sapi potong di Kota Pontianak.

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melakukan pendataan peternak dan pendataan sapi kepada masyarakat secara berkala, memberikan informasi-informasi dalam penyelenggaraan peternakan sapi agar mendapatkan kualitas sapi yang baik serta melakukan pengecekan kesehatan sapi, dan memberikan sertifikat dalam melakukan pemotongan hewan sapi sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan jelas disampaikan oleh atasan dalam hal ini

Kepala Dinas sehingga tidak menghambat jalannya implementasi. Dilakukan koordinasi dengan para agen pelaksana sehingga mempermudah dalam melaksanakan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebijakan pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Informasi yang diterima oleh agen pelaksana juga sudah jelas dan dapat difahami dengan baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan melalui pengolahan data hasil observasi obyek – obyek penelitian, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah berhasil mengimplementasikan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan sapi potong di Kota Pontianak yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa dilihat dari 4 (empat) aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Capaian Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Pangan Pertanian Perikanan Kota Pontianak telah melaksanakan aspek implementasi melalui program/kegiatan yang telah dilakukan dengan pencapaian sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal “Berhasil”
- b. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan “Berhasil”
- c. Program penjaminan mutu pangan asal hewan “Berhasil”
- d. Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat dan halal “Berhasil”
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak “Berhasil”
- f. Program peningkatan keamanan pangan hewan “Berhasil”

Dari setiap program yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Pontianak dalam fasilitasi pembentukan kawasan usaha sapi potong mencapai capaian berhasil.

2. Aspek Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berjumlah 58 orang pegawai pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak serta anggaran yang tersedia pada tahun 2018/2019, yaitu untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.296.735.428,- dengan realisasi penyerapan anggaran yaitu 97,67 %. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15.133.535.858,- dengan realisasi penyerapan anggaran yaitu 87,27 %.

3. Aspek Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Agen Pelaksana

Dalam implementasi peraturan daerah Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Pontianak sebagai agen pelaksana sangat setuju dan mendukung dengan adanya kebijakan peraturan daerah ini. Agen pelaksana beranggapan bahwa peraturan daerah ini sangat penting dan selaras untuk tercapainya misi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yaitu untuk mewujudkan ketersediaan bahan pangan hewani yang ASUH bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan.

4. Aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran kebijakan pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan jelas disampaikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas sehingga tidak menghambat jalannya implementasi. Dilakukan koordinasi dengan para agen pelaksana sehingga mempermudah dalam melaksanakan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebijakan pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Informasi yang diterima oleh agen pelaksana juga sudah jelas dan dapat difahami dengan baik.

2. Saran

Adapun saran dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan Peternakan dan Perikanan Kota Pontianak lebih melibatkan peternak

dalam pembuatan kebijakan - kebijakan. Karena pada kenyataannya peran peternak masih kurang dilibatkan, dimana kebijakan tersebut juga berdampak besar bagi peternak sapi di Kota Pontianak. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pontianak agar lebih aktif lagi untuk mendengarkan aspirasi peternak sapi agar tercapainya ketersediaan bahan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat dan meningkatnya kesehatan hewan.

2. Pemerintah Kota Pontianak agar terus berupaya untuk memenuhi hak-hak peternak yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, serta penyediaan fasilitas penunjang peternakan sapi di Kota Pontianak

F. REFERENSI

Sumber Buku :

- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Konsep dan Aplikasi Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sistaningrum. 2010. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanian Terhadap Struktur Penguasaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolog, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Hidayat, Ilyas Imron. 2015 skripsi: *Implementasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan*.

Prianggara, Agil. 2013. *Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok*. Surabaya: Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya.

Auristha, Ade. M. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi*

Sumatra Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya. Medan: Fisip USU.

Peraturan

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas pangan pertanian dan perikanan Kota Pontianak

Peraturan walikota nomor 78 Tahun 2008 adalah melaksanakan kebijakan teknis dibidang pematangan hewan sapi

Sumber Lain

Dinas. 2019. *Profil Dinas Pangan Peternakan dan Perikanan Kota Pontianak*. Diambil pada tanggal 03 Juni 2019 dari <https://pertanian.pontianakkota.go.id/profil-uptd/2-uptd-rph-sapi.html>

BPS. 2019. *Badan Pusat Statistik Kota Pontianak*. Diambil pada tanggal 28 Agustus 2020 dari <http://pontianakkota.bps.go.id/publication/2020/04/27/14a827962b89ff409d345446/kota-pontianak-dalam-angka-2020.html>

